

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah baik itu yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya. Pemerintah daerah diberikan wewenang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Analisis laporan keuangan merupakan salah satu media atau cara untuk melihat dan menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Analisis laporan keuangan merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan.

Dalam menilai kualitas kinerja keuangan daerah, perlu dilakukan Analisis Laporan Keuangan untuk mengukur bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam satu periode akuntansi. Namun pengukuran tersebut bisa dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka menjaga kualitas dan kredibilitas sebuah laporan keuangan, maka pemerintah membutuhkan Teknik atau cara tertentu yang tepat supaya kegiatan pengukuran kinerja ini dapat berguna bagi para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan. Terdapat beberapa indeks pengukuran untuk melihat bagaimana kinerja tata kelola keuangan daerah diantaranya yaitu melihat kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selain Pengukuran Kinerja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2020, pengukuran kinerja akan lebih berguna untuk para pengambil keputusan seperti investor jika dilihat dari pengukuran analisis keuangannya juga. Terdapat beberapa analisis keuangan untuk mengukur kinerja keuangan diantaranya Analisis Aset, Analisis Rasio keuangan, Analisis Pertumbuhan, dan Analisis Arus Kas.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis hanya akan membahas beberapa indeks pengelolaan keuangan dan juga analisis keuangan dikarenakan keterbatasan data serta dokumen yang didapatkan. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk menulis laporan Tugas Akhir dengan judul **“Tinjauan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015-2019”**





1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang, maka penulis memutuskan mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara pengukuran kinerja keuangan pemerintah Provinsi Banten jika dilihat dari Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020?
2. Bagaimana cara pengukuran kinerja keuangan pemerintah Provinsi Banten jika dilihat dari analisis Aset?
3. Bagaimana cara pengukuran kinerja keuangan pemerintah Provinsi Banten jika dilihat dari analisis Rasio Keuangan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan pengulis mengambil rumusan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui cara pengukuran kinerja keuangan pemerintah Provinsi Banten jika dilihat dari Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020.
2. Mengetahui cara pengukuran kinerja keuangan pemerintah Provinsi Banten jika dilihat dari analisis Aset.
3. Mengetahui cara pengukuran kinerja keuangan pemerintah Provinsi Banten jika dilihat dari analisis Rasio Keuangan.

1.4 Manfaat

1. Penulis dapat menambah wawasan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
2. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah di dalam menentukan kebijakan serta menentukan strategi untuk perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah di masa yang akan datang.
3. Menjadi bahan referensi yang dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang sedang melakukan penulisan atau penelitian lebih lanjut mengenai kinerja laporan keuangan pemerintah.
4. Menjadi informasi untuk masyarakat tentang laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana oleh pemerintah khususnya pada provinsi Banten.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies